



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin No.19 Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon 0541-765029,765041,765048 Faksimile 0541-744680

**SIARAN PERS
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 24 Februari 2023**

Pada hari Jumat (24 Februari 2023), bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Pukul 10.00 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Tahun Anggaran 2022 dari entitas pemeriksaan kepada BPK Perwakilan Provinsi Kaltim. Dua entitas yang menyerahkan adalah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Samarinda. Penyerahan LKPD *Unaudited* TA 2022 ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Timur, Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.

Dalam penyerahan LKPD *Unaudited* TA 2022 tersebut, didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh masing-masing Kepala Daerah secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Daerah dan sambutan dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltim, Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.

Penyerahan LKPD *Unaudited* TA 2022 ini untuk memenuhi amanat Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa laporan keuangan disampaikan Kepala Daerah kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, BPK berkewajiban melaksanakan pemeriksaan serta menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima LKPD *Unaudited* dari pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kepala Perwakilan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelesaikan LKPD *Unaudited* dan menyampaikannya kepada BPK sesuai ketentuan undang-undang. Dengan telah diterimanya LKPD *Unaudited* maka BPK akan menindaklanjuti dengan segera menugaskan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan terinci. Untuk itu, dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan mengharapkan kerja sama yang baik dari pemerintah daerah untuk menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang Administrasi Umum, Inspektur, Kepala BPKAD, beserta jajaran pejabat lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Samarinda, serta para pejabat struktural dan fungsional serta pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Humas TU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.